

PENGARUH MANAJEMEN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MOJONG KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ayu Andira Suarni¹, Erfina², Andi Astinah Adnan³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: ayuandira0910580422010@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mojong Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan jumlah populasi penerima KKS sebanyak 1.041 orang dan sampel sejumlah 91 responden yang ditentukan menggunakan teknik proportional sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Program KKS di Desa Mojong berada pada kategori baik dengan persentase rata-rata pada kategori baik. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa manajemen Program KKS berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 10 %. Selain itu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara manajemen Program KKS terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mojong Kabupaten Sidenreng.

Kata Kunci: Manajemen Program KKS, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to determine the effect of the management of the Prosperous Family Card Program on the welfare of the community in Mojong Village, Sidenreng Rappang Regency. The research method used is quantitative with a population of 1,041 KKS recipients and a sample of 91 respondents determined using proportional sampling techniques. Data collection techniques were carried out through observation, questionnaires, and literature studies. Data analysis techniques used descriptive statistical analysis, validity tests, reliability tests, and simple linear regression analysis with the help of the SPSS application. The results of the study indicate that the management of the KKS Program in Mojong Village is in the good category with an average percentage in the good category. The results of the regression analysis show that the management of the KKS Program has an effect on community welfare by 10%. In addition, the results of the hypothesis test show that H_a is accepted and H_0 is rejected, which means there is a significant influence between the management of the KKS Program on community welfare in Mojong Village, Sidenreng Regency.

Keywords: KKS Program Management, Community Welfare.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang stabil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan,

perluasan kesempatan kerja, serta perbaikan akses terhadap layanan publik (Prawesti Ningrum et al., 2024). Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mampu menikmati hasil pembangunan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Khairiyani et al., 2019).

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Secara ekonomi, kemiskinan ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup minimum (Arman, 2023). Secara sosial, kemiskinan seringkali berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, serta terbatasnya partisipasi dalam kehidupan sosial. Secara struktural, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berpotensi memperkuat siklus kemiskinan antar generasi, sehingga keluarga miskin cenderung sulit keluar dari kondisi tersebut (Wirata, 2022). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi melalui kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, terutama kelompok miskin dan rentan. Konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyediaan perlindungan sosial dan distribusi sumber daya demi tercapainya keadilan sosial (Terry, 2019). Dalam konteks Indonesia, komitmen tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai implementasi dari kebijakan perlindungan sosial, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu program tersebut adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2016 (Juniarto, 2021). Program ini merupakan bagian dari transformasi sistem bantuan sosial non-tunai yang dirancang agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. KKS berfungsi sebagai identitas keluarga penerima manfaat yang datanya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT), sehingga penyaluran bantuan diharapkan lebih efektif. Mekanisme penyaluran bantuan sosial non-tunai ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang menekankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan (Peraturan Presiden RI No 63 Tahun, 2017).

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, angka kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 15.480 jiwa atau 5,02%, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 sebesar 15.750 jiwa atau 5,14% (Damayanti et al., 2025). Penurunan sebesar 270 jiwa atau 0,12% tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa program perlindungan sosial, termasuk KKS dan Program Keluarga Harapan (PKH), berkontribusi terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Akan tetapi, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari penurunan angka kemiskinan secara agregat, melainkan juga dari efektivitas pengelolaan program di tingkat pelaksanaan, khususnya di desa sebagai ujung tombak pelayanan publik (Nurhanifah, 2017).

Secara teoritis, manajemen program merupakan rangkaian proses yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Terry, 2019). Dalam konteks bantuan sosial, kualitas manajemen program sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Manajemen yang baik tercermin pada ketepatan sasaran penerima manfaat, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu penyaluran, serta adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan yang memadai. Jika salah satu fungsi manajemen tidak berjalan optimal, maka program berpotensi menimbulkan permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, atau bahkan konflik sosial di masyarakat (Ramanda, 2020).

Fenomena di tingkat desa menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan kendala dalam pelaksanaan Program KKS, seperti akurasi pendataan penerima manfaat, kurangnya sosialisasi terkait mekanisme penggunaan bantuan, serta terbatasnya evaluasi program setelah bantuan disalurkan. Permasalahan tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana manajemen Program KKS di tingkat desa telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan kebijakan perlindungan sosial (Permatasari, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis kualitas manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Mojong Kabupaten Sidenreng Rappang serta menguji pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat manajemen Program KKS di Desa Mojong; (2) mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat penerima KKS; dan (3) menganalisis pengaruh manajemen Program KKS terhadap kesejahteraan masyarakat (Eriranda et al., 2024).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan (Fadhli & Annisa, 2024). Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen program sosial dan kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas program bantuan sosial dalam perspektif manajemen publik (Syahyuti, 2020).

B. METODE

Untuk mengkaji secara empiris pengaruh manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mojong Kabupaten Sidenreng Rappang, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel manajemen program sebagai variabel independen dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen secara objektif dan terukur.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 91 responden yang merupakan penerima manfaat Program KKS di Dusun Bendoro, Lasilotong, dan Baramming. Selain itu, observasi dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan program di tingkat desa. Untuk mendukung analisis, data sekunder diperoleh dari dokumen desa serta publikasi statistik terkait kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis data untuk mengkaji manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta tingkat kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di Desa Mojong, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil pengolahan data disajikan untuk menggambarkan kualitas manajemen program dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah ringkasan hasil kajian ini:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Indikator Ketetapan Sasaran

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	9	36	10%
2.	Baik	3	75	225	82%
3.	Tidak Baik	2	6	12	7%
4.	Sangat Tidak Baik	1	1	1	1%
Jumlah			91	274	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{274}{91} = 3,01$ $\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3,01 \times 100\%}{4} = 75\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 9 responden menyatakan sangat baik, 75 responden menyatakan baik, 6 responden menyatakan tidak baik, dan 1 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator ketetapan pada program kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 75%.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Indikator Ketetapan Jumlah Bantuan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	22	88	24%
2.	Baik	3	61	183	67%
3.	Tidak Baik	2	7	14	8%
4.	Sangat Tidak Baik	1	1	1	1%
Jumlah			91	286	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{286}{91} = 3,14$ $\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3,14 \times 100\%}{4} = 77\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 22 responden menyatakan sangat baik, 61 responden menyatakan baik, 7 responden menyatakan tidak baik, dan 1 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator ketetapan jumlah bantuan pada program kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 77%.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Indikator Waktu Penyaluran

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	18	72	20%
2.	Baik	3	66	198	72%
3.	Tidak Baik	2	7	14	8%
4.	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0%
Jumlah			91	284	100 %

$$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{284}{91} = 3,12$$

$$\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3.12 \times 100\%}{4} = 78\%$$

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 18 responden menyatakan sangat baik, 66 responden menyatakan baik, 7 responden menyatakan tidak baik, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator waktu penyaluran pada program kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 78%.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Indikator Pemanfaatan Bantuan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	17	68	19%
2.	Baik	3	61	183	67%
3.	Tidak Baik	2	10	20	11%
4.	Sangat Tidak Baik	1	3	3	3%
Jumlah			91	274	100 %

$$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{274}{91} = 3,01$$

$$\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3.14 \times 100\%}{4} = 75\%$$

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 17 responden menyatakan sangat baik, 61 responden menyatakan baik, 10 responden menyatakan tidak baik, dan 3 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator tingkat pemanfaatan bantuan pada program kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 75%.

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Indikator Dampak Program Kualitas Hidup

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	27	108	30%
2.	Baik	3	52	156	57%
3.	Tidak Baik	2	9	18	10%
4.	Sangat Tidak Baik	1	3	3	3%
Jumlah			91	285	100 %

$$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{285}{91} = 3,13$$

$$\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3.13 \times 100\%}{4} = 78\%$$

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 27 responden menyatakan sangat baik, 52 responden menyatakan baik, 9 responden menyatakan tidak baik, dan 3 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator dampak program kualitas hidup pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 78%.

Tabel 6 Rekapitulasi Variabel Manajemen Program KKS

No	Indikator	Persentase (%)
1.	Ketepatan Sasaran (<i>Targeting Accuracy</i>)	75%
2.	Ketepatan Jumlah Bantuan (<i>Adequacy of Benefit</i>)	79%

ARTIKEL

3.	Ketepatan Waktu Penyaluran (<i>Timeliness</i>)	78%
4.	Pemanfaatan Bantuan untuk Kebutuhan Dasar (<i>Utilization of Aid</i>)	75%
5.	Dampak Program terhadap Kualitas Hidup	78%
Rata-rata		77%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 5 indikator pada variabel Manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 77% dengan jumlah keseluruhan frekuensi sebesar 1.403. Sehingga untuk mengetahui jumlah persentase, maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{1.403}{4 \times 5 \times 91} = \frac{1.403}{1.820} \\ &= 0,7708 \times 100 \\ &= 77,08\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai yang diperoleh dari penerapan variabel Manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera pada manajemen program kartu keluarga sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 77,08% dari 100% hasil yang diharapkan dengan kategori sangat baik.

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Indikator Peningkatan Pra Sejahtera

No.	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	15	60	16%
2.	Baik	3	68	204	75%
3.	Tidak Baik	2	8	16	9%
4.	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0%
Jumlah			91	280	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{280}{91} = 3,07$					
$\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3,07 \times 100\%}{4} = 77\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 15 responden menyatakan sangat baik, 68 responden menyatakan baik, 8 responden menyatakan tidak baik, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator peningkatan pra sejahtera pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 77%.

Tabel 8 Distribusi Frekuensi Indikator Peningkatan Kesejahteraan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	17	68	19%
2.	Baik	3	67	201	74%
3.	Tidak Baik	2	7	14	8%
4.	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0%
Jumlah			91	283	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{283}{91} = 3,10$					
$\text{Rata-rata Persentase} = \frac{3,10 \times 100\%}{4} = 77\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 17 responden menyatakan sangat baik, 67 responden menyatakan baik,

7 responden menyatakan tidak baik, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator peningkatan kesejahteraan pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 77%.

Tabel 9 Distribusi Frekuensi Indikator Pemenuhan Kebutuhan Pangan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	30	90	33%
2.	Baik	3	55	165	60%
3.	Tidak Baik	2	4	8	4%
4.	Sangat Tidak Baik	1	2	2	2%
Jumlah			91	265	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{265}{91} = 2,91$					
Rata-rata Persentase = $\frac{2,91 \times 100\%}{4} = 73\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisiонер, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisiонер tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 30 responden menyatakan sangat baik, 55 responden menyatakan baik, 4 responden menyatakan tidak baik, dan 2 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator pemenuhan kebutuhan pangan berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 73%.

Berdasarkan ketiga hasil olah data kuisiонер pada indikator Kondisi Tempat Tinggal yang masing-masing menunjukkan persentase 77%, 73% dan 80% setelah diakumulasi memperoleh persentase sebesar 77%. Oleh karena itu, indikator kondisi tempat tinggal pada variabel kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan memiliki kategori sangat baik.

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Indikator Layanan Kesehatan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	30	120	33%
2.	Baik	3	54	162	59%
3.	Tidak Baik	2	4	8	4%
4.	Sangat Tidak Baik	1	3	3	3%
Jumlah			91	293	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{293}{91} = 3,21$					
Rata-rata Persentase = $\frac{3,21 \times 100\%}{4} = 80\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisiонер, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisiонер tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 30 responden menyatakan sangat baik, 54 responden menyatakan baik, 4 responden menyatakan tidak baik, dan 3 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator layanan kesehatan pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 80%.

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Indikator Pengeluaran Rumah Tangga

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	20	80	22%
2.	Baik	3	62	186	68%
3.	Tidak Baik	2	8	16	9%
4.	Sangat Tidak Baik	1	1	1	1%

ARTIKEL

Jumlah	91	283	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{280}{91} = 3,10$			
Rata-rata Persentase = $\frac{3.10 \times 100\%}{4} = 77\%$			

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 20 responden menyatakan sangat baik, 62 responden menyatakan baik, 8 responden menyatakan tidak baik, dan 1 responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator pengeluaran rumah tangga pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 77%.

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Indikator Kebutuhan Dasar Pendidikan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	20	80	22%
2.	Baik	3	63	189	69%
3.	Tidak Baik	2	8	16	9%
4.	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0%
Jumlah			91	285	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{285}{91} = 3,13$					
Rata-rata Persentase = $\frac{3.13 \times 100\%}{4} = 78\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 20 responden menyatakan sangat baik, 63 responden menyatakan baik, 8 responden menyatakan tidak baik, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kebutuhan dasar tempat tinggal pada kks berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 78%.

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Indikator Merencanakan Pengeluaran Bulanan

No	Tanggapan Responden	Bobot (b)	Frekuensi (f)	Skor (fxb)	Persentase(%)
1.	Sangat Baik	4	28	112	31%
2.	Baik	3	53	159	58%
3.	Tidak Baik	2	10	21	11%
4.	Sangat Tidak Baik	1	0	0	0%
Jumlah			91	292	100 %
$\sum \frac{FxN}{N} = \frac{292}{91} = 3,20$					
Rata-rata Persentase = $\frac{3.20 \times 100\%}{4} = 80\%$					

Sumber: Hasil olah data kuisisioner, Maret 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut, diketahui bahwa dari total 91 responden, sebanyak 28 responden menyatakan sangat baik, 53 responden menyatakan baik, 10 responden menyatakan tidak baik, dan tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator merencanakan pengeluaran bulanan berada pada kategori baik, dengan tingkat pencapaian sebesar 80%.

Berdasarkan kedua hasil olah data kuisisioner pada indikator Kebutuhan Dasar yang masing-masing menunjukkan persentase 78% dan 80% setelah diakumulasi memperoleh

persentase sebesar 79%. Oleh karena itu, indikator akses layanan kesehatan pada variabel kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan memiliki kategori sangat baik.

Tabel 14 Rekapitulasi Variabel Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator	Persentase (%)
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pangan	77%
2.	Kondisi Tempat Tinggal	77%
3.	Akses Pendidikan Bagi Anak	77%
4.	Akses Layanan Kesehatan	79%
Rata-rata		77%

Dengan mengakumulasi hasil rata-rata persentase dari 5 indikator pada variabel Manajemen Program Kartu Keluarga Sejahtera di atas, maka hasil rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 77% dengan jumlah keseluruhan frekuensi sebesar 1.981. Sehingga untuk mengetahui jumlah persentase, maka dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot Tertinggi} \times \text{jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &= \frac{1.981}{4 \times 7 \times 91} = \frac{1.981}{2.548} \\ &= 0,7774 \times 100 \\ &= 77,74\% \end{aligned}$$

Jadi, nilai yang diperoleh dari penerapan variabel kesejahteraan masyarakat pada manajemen program kartu keluarga sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat di desa mojong kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappanga dalah 77,74% dari 100% hasil yang diharapkan dengan kategori sangat baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 91 responden penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Mojong, dapat disimpulkan bahwa manajemen Program KKS berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program, mulai dari pendataan, penyaluran bantuan, hingga pengawasan, secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen Program KKS terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, kualitas pengelolaan program memiliki kontribusi dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pada aspek pangan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh manajemen Program KKS, tetapi juga oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi dan pendapatan keluarga. Dengan demikian, Program KKS dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mojong.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, M. (2023). Penguatan Demokrasi Desa. *Komunikasi*, 1(1).
- Damayanti, T., Sellang, K., & Uceng, A. (2025). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 4(2), 101-107.
- Eriranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 560-584.
- Fadhli, M., & Annisa, Y. (2024). Masyarakat Madani partisipasi masyarakat dalam pemetaan ekonomi. *Jurnal Masyarakat Madani*, 9(1), 117-134.

- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi*. Makassar: Nur Lina.
- Juniarto, P. A., & Laksmono, B. S. (2021). Pemberdayaan Kelompok Pengurus E-Warong Kube Pkh Harapan JayaKelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Jakarta Selatan MelaluiPemanfaatan Teknologi dan Informasi. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 3(2), 5.
- Khairiyani, K., Mubyarto, N., Mutia, A., Zahara, A. E., & Habibah, G. A. (2019). Kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan serta implikasinya terhadap nilai perusahaan. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 3(1), 41-62.
- Nurhanifah, O. (2017). Hubungan Persepsi Masyarakat Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kelurahan Sempaja Selatan. *Ejurnal Administrasi Negara*, 5(2), 6026-6037.
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Permatasari, A. (2024). Tanggung jawab dan perlindungan negara atas hak-hak sosial ekonomi pengelolaan sumber daya alam menurut undang-undang dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 272-289.
- Prawesti, N. E., Endah, N. S., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116-126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Ramanda, P. Y. (2020). *Fungsi-Fungsi Manajemen "POAC"*. Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Syahyuti. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Pertanian. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), 121–126.
- Terry, G. R. (2019). *Principles of Management*. R. D. Irwin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Wirata, G. (2022). *Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Banyumas: Pena Persada.